

**PENGARUH PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI
SISTEM INFORMASI PERIZINAN BERBASIS APLIKASI WEB TERHADAP
KUALITAS PELAYANAN HER-REGISTRASI SIUP
DI BPPT KABUPATEN KUNINGAN**

Ahmad Jajuli, Retno Widayani

¹ Magister Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Universitas
Swadaya Gunung Jati

² Universitas Muhammadiyah Cirebon

Email retno.widayani@umc.ac.id



DOI : 10.33603/reformasi.v7i2.10902

Diterima: Pebruari 2023; Direvisi: Maret 2023; Dipublikasikan: April 2023

Abstrak

Pelayanan publik, dan pengolahan data media penyimpanan belum sepenuhnya terkomputerisasi, proses pelayanan kurang dipahami oleh masyarakat saat mengakses website, karena website tersebut tidak user friendly. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis aspek pengaruh berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan sistem informasi perizinan berbasis aplikasi web dan bertujuan untuk menjelaskan dampaknya terhadap kualitas layanan herregistrasi siup di bppt kabupaten kuningan. Perencanaan yang dieksplorasi melalui teori perencanaan sistem informasi adalah memahami masalah, mendefinisikan masalah secara rinci, Menetapkan Tujuan Membuat sistem, mengidentifikasi kendala hasil yang ditetapkan dalam proposal proyek. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei eksplanasi (Survei Penjelasan). Metode Survei Penjelasan yang digunakan dalam penelitian ini karena data yang akan dikumpulkan dari populasi karyawan Badan Perizinan Layanan Terpadu Kabupaten Kuningan sebanyak 46 karyawan. Ada pengaruh perencanaan sistem informasi terhadap kualitas pelayanan herregistrasi BPPT SIUP di Kabupaten Kuningan. Hasil penelitian menunjukkan perizinan sistem informasi implementasi aplikasi web berbasis web dengan kualitas pelayanan termasuk pendaftaran ulang SIUP dengan baik, sarana komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi yang meliputi penyaluran komunikasi, kejelasan informasi, kemudahan komunikasi, konsistensi kebijakan, kecukupan pelatihan dan dukungan staf sehingga kompeten, Kemudahan penggunaan informasi, pembagian penggunaan wewenang, mendukung fasilitas yang memadai, personel penyortiran, dukungan Insentif, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan tanggung jawab Penempatan di BPPT telah berjalan dengan baik meskipun tidak optimal. Di sana bersama-sama mempengaruhi perencanaan dan pelaksanaan karyawan untuk bermutu layanan herregistrasi SIUP di Badan Perizinan Layanan Terpadu yang baik Kabupaten Kuningan. Semua efeknya positif, artinya semakin baik perencanaan dan implementasi izin aplikasi web berbasis sistem informasi juga akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam pendaftaran ulang SIUP BPPT Kecamatan Kuningan. Semua efeknya juga signifikan, artinya perencanaan dan implementasi izin aplikasi web berbasis sistem informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas layanan pendaftaran ulang BPPT SIUP di Kabupaten Kuningan. Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengusulkan hipotesis yang dapat diuji dan diterima.

Kata kunci: perencanaan, implementasi, kualitas layanan

PENDAHULUAN

Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan pelayanan publik, namun dalam pelaksanaannya sering dihambat oleh suatu birokrasi perizinan yang kompleks dimana masyarakat dan kalangan dunia usaha sering mengeluhkan akan proses pelayanan perizinan yang tidak memiliki kejelasan prosedur, tidak transparan, waktu pemrosesan izin yang tidak pasti, tingginya biaya yang harus dikeluarkan terutama berkaitan dengan biaya- biaya yang tidak resmi.

Berdasarkan hal tersebut selanjutnya mendorong pemerintah di tingkat provinsi untuk melakukan peningkatan pelayanan publik ditingkat kabupaten atau kota. Sebagai implementasi atas kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam sektor pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Kuningan

Akan tetapi dalam pelaksanaannya, masih banyak keluhan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kuningan , hal ini diduga karena manajemen yang diterapkan di internal BPPT belum berjalan dengan baik dengan terlihat pada proses pembuatan izin yang memerlukan waktu yang relatif lama, tingkat kekeliruan (nama, alamat, status, pekerjaan ,dll), pengolahan data yang belum seluruhnya terkomputerisasi, dan kurangnya sarana prasarana untuk menyampaikan aspirasi dan penyediaan informasi tentang perizinan yang bisa diakses oleh masyarakat luas.

Maka dari itu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat, dipandang perlu perencanaan manajemen data dan informasi pelayanan perizinan kepada seluruh lapisan masyarakat dimanapun berada, dan mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008

Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-GOVERNMENT*, Kepala Badan telah mengeluarkan kebijakan melalui Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kuningan No.800/KPTS.851/2011 Tentang Penerapan Sistem Informasi Perizinan Berbasis Aplikasi Web.

Tetapi dalam pelaksanaannya setelah 2 tahun kebijakan itu di implementasikan dirasa kurang mengenai sasaran, karena masih ada kesenjangan dari tujuan yang di harapkan, kesenjangan itu muncul diduga karena implementasi kebijakan sistem informasi perizinan berbasis aplikasi web yang sudah diterapkan di BPPT kabupaten kuningan belum berjalan secara maksimal, sehingga tidak adanya kejelasan prosedur pelayanan perizinan dan masih besarnya tingkat human error yang sering menyebabkan kekeliruan pada penulisan nama, alamat, dll. Dengan melakukan penerapan sistem informasi yang berbasis *Information technologi (IT)* dan komputerisasi yang maksimal diduga akan lebih memudahkan dan mempercepat proses pembuatan dan penyampaian data informasi Izin.

Rumusan Masalah

1. Seberapa besar pengaruh perencanaan terhadap kualitas pelayanan herregistrasi surat izin usaha perdagangan (SIUP) di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kuningan?
2. Seberapa besar pengaruh implementasi sistem informasi perizinan berbasis aplikasi web terhadap kualitas pelayanan herregistrasi surat izin usaha perdagangan (SIUP) di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kuningan?
3. Seberapa besar pengaruh perencanaan dan implementasi sistem informasi

perizinan berbasis aplikasi web secara bersama-sama terhadap kualitas pelayanan herregistrasi surat izin usaha perdagangan (SIUP) di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kuningan ?

LANDASAN TEORI

Teori Perencanaan Sistem Informasi

Teori Perencanaan Sistem Informasi ditujukan untuk membangun suatu sistem informasi yang kompleks secara sistematis dan terintegrasi, dibutuhkan perencanaan sistem agar dapat menuntun pembuat untuk menghasilkan suatu sistem yang standar.

Tahap Perencanaan

Adapun tahap perencanaan sistem informasi menurut Budi Sutedjo Dharma Utomo (2006:151) langkah- langkah dalam perencanaan sistem informasi yaitu:

1. Tim pembuat sistem mencoba memahami permasalahan yang muncul
2. Mendefinisikan permasalahan secara rinci
3. Menentukan Tujuan Pembuatan sistem
4. Mengidentifikasi kendala-kendalanya
5. Hasilnya dituangkan dalam proposal proyek

Implementasi Kebijakan

Teori Implementasi Kebijakan

Model implementasi kebijakan ketiga yang berperspektif top down dikembangkan oleh George C. Edward III yakni menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Edward III mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan pokok, yakni:

- (i) faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan? dan
 - (ii) faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan?
- Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut dirumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses

implementasi, yakni (1) komunikasi;(2) sumber daya;(3) disposisi; (4) sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi termasuk tata aliran kerja birokrasi.

Pengertian *Electronic Government*

Salah satu pendorong dan termasuk reformasi pemerintahan untuk mewujudkan *good governance* (khususnya dalam pelaksanaan otonomi daerah) adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, dan pembangunan. Effendi (2002) menyatakan, untuk membangun pemerintahan daerah yang lebih mam pu menyelenggarakan *good governance*, perlu dibangun jaringan kerja sama didasarkan atas hubungan (*lingkage*) yang partisipatif, transparan, dan responsif antar pilar-pilar *good governance*.

Sistem Informasi

Sistem Informasi dapat didefinisikan sebagai kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan untuk mengintergrasikan data, memproses dan menyimpan serta mendistribusikan informasi. Agar sistem informasi tersebut dapat beroperasi secara optimal, maka dibutuhkan teknologi informasi yang telah terbukti memiliki kinerja yang sangat unggul. Digunakannya TI sebagai basis pembangunan SI akan memberi jaminan lancarnya aliran data dan informasi serta akuratnya hasil pengolahan data. Aapalgi bila implementasi TI diikuti dengan instalasi jaringan maka distribusi informasi akan berlangsung secara cepat dan dinamis.

Pengertian Kualitas Pelayanan

Pengertian Pelayanan Salah satu fungsi-fungsi dari birokrasi pemerintahan adalah memberikan pelayanan bagi masyarakat. Dengan demikkian pelayanan dapat di definisikan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan pihak lain.

Sedangkan mengenai pelayanan yang berkualitas Sinambela, dkk. (2008 : 6) mengemukakan pelayanan prima tercermin dari :

1. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka.
2. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan.
3. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan.
4. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran sertadalam penyelenggaraan pelayanan publik.
5. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi.
6. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan.

Hipotesis

Berdasarkan pendahuluan dan kerangka pemikiran penelitian maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut :

1. Perencanaan besar pengaruhnya terhadap kualitas pelayanan herregistrasi surat izin usaha perdagangan (SIUP) di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kuningan.
2. Implementasi sistem informasi perizinan berbasis aplikasi web besar pengaruhnya terhadap kualitas pelayanan herregistrasi surat izin usaha perdagangan (SIUP) di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kuningan.
3. Perencanaan dan implementasi sistem informasi perizinan berbasis aplikasi web secara bersama-sama besar pengaruhnya terhadap kualitas pelayanan herregistrasi surat izin usaha perdagangan (SIUP) di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kuningan.

METODE PENELITIAN

REFORMASI Vol 8 No 2 April 2023

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Eksplanatori Surveidengan pendekatan kuantitatif. Metode *Survey Eksplanatory* digunakan dalam penelitian ini karena metode ini mengemukakan fakta-fakta yang didukung oleh penyebaran angket kepada responden serta pemahaman literatur.

Operasional Variabel

1. Variabel Independen (X)
Variabel ini dalam bahasa indonesia disebut variabel bebas. Menurut Sugiyono (2007:4), “variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel independen
2. Variabel Dependen (Y)
Menurut Sugiyono (2007:4), “Variabel terikat merupakan suatu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya varibel bebas.”

Teknik Pengolahan Data Uji Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang dipergunakan untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, instrumen utama yang digunakan adalah kuisioner dengan format jawaban skala Likert terdiri item positif dan item negatif.

$$r_s = \frac{\sum X^2 + \sum Y^2 - \sum di^2}{2 \sqrt{(\sum X^2)(\sum Y^2)}}$$

Uji Validitas Instrumen Penelitian

Pengujian validitas instrumen penelitian dilakukan dengan cara mengadakan uji coba penyebaran angket kepada responden yang kemudian hasilnya dianalisis menggunakan rumus *Koefisien Korelasi Rank Spearman* yaitu

Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Pada penelitian ini dilakukan pengujian reliabilitas dengan menggunakan *internal consistency*, dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja. Hasil analisis dapat

digunakan untuk memprediksi reliabilitas instrumen (Sugiyono, 2004 : 278).

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda merupakan alat untuk meramalkan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel terikat. Untuk membuktikan ada tidaknya hubungan fungsional atau hubungan kausal antara dua atau lebih variabel bebas X_1, X_2, X_3 terhadap suatu variabel terikat (Y) Sambas Ali (2009:198) Adapun model persamaan regresi berganda untuk populasi adalah sebagai berikut :

$$\hat{Y} = a + B_1 X_1 + B_2 X_2$$

Keterangan :

\hat{Y} =subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan.

a =harga \hat{Y} bila $x = 0$ (harga konstan).

b =angka arah atau koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen. Bila b positif maka naik, dan bila b negatif maka terjadi penurunan.

X = subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu

Koefisien Determinasi (R^2) dan Koefisien Beta ($\beta_{x_{iy}}$)

Analisis determinasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui prosentase sumbangan pengaruh variabel bebas (*independent*) secara serentak (bersama-sama) terhadap variabel terikat (*dependent*). Koefisien ini menunjukkan seberapa besar prosentase variasi dari variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat. Nilai koefisien determinasi ini berkisar antara 0 sampai 1, semakin mendekati angka satu dapat dikatakan bahwa model yang digunakan semakin baik.

Uji Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang selanjutnya diuji

kebenarannya sesuai dengan model dan analisis yang cocok. Hipotesis penelitian dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan.

1. Uji t (Parsial)

Uji t atau uji koefisien regresi secara parsial, digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. (Duwi Priyatno, 2012:139). Dalam penelitian ini, berarti uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen yang terdiri atas perencanaan dan Implementasi terhadap kualitas pelayanan yang merupakan variabel dependennya. Uji t digunakan untuk menguji hipotesis 1 dan 2 untuk menguji pengaruh perencanaan (X_1), Implementasi sistem informasi perizinan (X_2), terhadap kualitas pelayanan (Y) secara parsial.

2. Uji F atau Uji Simultan

Uji F atau yang disebut juga dengan uji simultan digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat signifikansi antara variabel – variabel independen secara simultan, atau secara bersama-sama. Dalam penelitian ini Uji f, digunakan untuk mengetahui hipotesis 1 dan 2 untuk menguji pengaruh perencanaan (X_1) , implementasi sistem informasi perizinan (X_2), terhadap kualitas pelayanan herregistrasi SIUP (Y) secara simultan atau bersama-sama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Regresi Berganda

Hasil perhitungan regresi pada tabel 4.14 menunjukkan bahwa ada pengaruh dari variabel perencanaan terhadap kualitas pelayanan perizinan yaitu sebesar 0.421. Tanda parameter positif pada angka 0.421 dapat dimaknakan ada pengaruh positif variabel perencanaan terhadap kualitas

pelayanan perizinan. Variabel implementasi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas pelayanan perizinan sebesar 0.362.

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.613	3.947		1.352	.048
	Perencanaan	.421	.145	.358	3.261	.000
	Implementasi	.362	.148	.263	3.137	.031

a. Dependent Variable: Kualitas

Dari hasil perhitungan SPSS for windows version 17 diperoleh R² sebesar 0,780 artinya bahwa perencanaan dan implementasi berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik sebesar 78,00% sedangkan sisanya sebesar 22,00% dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hasil perhitungan Koefisien Beta (β_{x1y}) atau Standardized coefficients masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat dengan SPSS for windows version 17 menunjukkan Koefisien Beta variabel perencanaan terhadap kualitas pelayanan perizinan (β_{x1y}) sebesar 0,358 artinya bahwa perencanaan berpengaruh sebesar 35,8 % terhadap kualitas, Koefisien Beta variabel implementasi terhadap kualitas (β_{x2y}) sebesar 0,263 artinya implementasi berpengaruh sebesar 26,3 % terhadap kualitas pelayanan perizinan.

Hasil Analisis Koefisien Determinasi Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.847 ^a	.780	.780	3.64192

a. Predictors: (Constant), Implementasi, Perencanaan
 b. Dependent Variable: Kualitas

Hasil Uji Hipotesis Uji t (Parsial)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.613	3.947		1.352	.048
	Perencanaan	.421	.145	.358	3.261	.000
	Implementasi	.362	.148	.263	3.137	.031

c. Dependent Variable: Kualitas

Pada tabel nilai t_{hitung} untuk perencanaan adalah 3.261 pada tingkat signifikansi (α) = 5% dengan df = n-k-1 (46-2-1 = 43) maka diperoleh t_{tabel} sebesar 2.017, Oleh karena t_{hitung} > t_{tabel} (3.261 > 2.017) maka Ho

ditolak dan Ha diterima, artinya secara parsial variabel perencanaan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan herregistrasi SIUP. Pada tabel nilai t_{hitung} untuk perencanaan adalah 3.137 pada tingkat signifikansi (α) = 5% dengan df = n-k-1 (46-2-1 = 43) maka diperoleh t_{tabel} sebesar 2.017, Oleh karena t_{hitung} > t_{tabel} (3.137 > 2.017) maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya secara parsial variabel Implementasi berpengaruh terhadap kualitas pelayanan herregistrasi SIUP.

Uji F (Simultan)

Uji F atau yang disebut juga dengan uji simultan digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat signifikansi antara variabel – variabel independen secara simultan, atau secara bersama-sama. Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah secara simultan perencanaan dan implementasi memiliki pengaruh terhadap kualitas pelayanan perizinan.

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2691.243	2	1345.621	5.206	.000 ^a
	Residual	801.347	43	18.636		
	Total	3492.589	45			

a. Predictors: (Constant), X2, X1
 b. Dependent Variable: Y

Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%, α = 5%, dengan derajat kebebasan df 1 (jumlah variabel – 1) atau (3-1 = 2), dan df 2 (n-k-1), atau 46-2-1 = 43, dimana n adalah jumlah kasus dan k adalah jumlah variabel independen, maka untuk hasil F_{tabel} diperoleh sebesar 3.214.

Pada tabel 4.17, nilai F_{hitung} sebesar 5.206, karena F_{hitung} > F_{tabel} (5.206 > 3.214), maka Ho ditolak, artinya perencanaan dan implementasi sistem informasi perizinan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas pelayanan herregistrasi SIUP pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab Kuningan.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN Pengaruh Perencanaan Terhadap Kualitas Pelayanan Herregistrasi SIUP

di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kuningan

Berdasarkan hasil perhitungan Koefisien Beta (β_{x_1y}) atau *Standardized coefficients* masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat dengan *SPSS for windows version 17* Koefisien Beta variabel perencanaan (X_1) terhadap kualitas pelayanan perizinan (β_{x_1y}) sebesar 0,358 artinya bahwa perencanaan berpengaruh sebesar 35,8 % terhadap kualitas pelayanan perizinan. Dalam pengujian hipotesis yang berkaitan dengan korelasi / keeratan hubungan antara perencanaan dengan kualitas pelayanan perizinan ternyata signifikan, dimana nilai t hitung sebesar 3,261 lebih besar dari t table yaitu 2,017.

Memperhatikan hasil tersebut dapat diinterpretasikan bahwa perencanaan berpengaruh positif terhadap kualitas pelayanan perizinan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kuningan. Hal ini di dukung dengan hasil penelitian perencanaan yang secara total menunjukkan kumulatif sebesar 83,03 %, sedangkan hasil penelitian kualitas pelayanan perizinan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kuningan sebesar 82,66 %. Keduanya termasuk kedalam kriteria baik.

Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Perizinan Terhadap Kualitas Pelayanan Herregistrasi SIUP di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kuningan

Berdasarkan hasil perhitungan Koefisien Beta (β_{x_2y}) atau *Standardized coefficients* masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat dengan *SPSS for windows version* Koefisien Beta variabel Implementasi terhadap kualitas pelayanan Perizinan (β_{x_2y}) sebesar 0,263 artinya implementasi berpengaruh sebesar 26,3 % terhadap kualitas pelayanan perizinan. Dalam pengujian hipotesis yang berkaitan dengan korelasi / keeratan hubungan antara implementasi dengan kualitas pelayanan perizinan ternyata signifikan,

dimana nilai t hitung sebesar 3.137 lebih besar dari t table yaitu 2,017.

Memperhatikan hasil tersebut dapat diinterpretasikan bahwa implementasi berpengaruh positif terhadap kualitas pelayanan perizinan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kuningan. Hal ini di dukung dengan hasil penelitian implementasi yang secara total menunjukkan kumulatif sebesar 81,23%, sedangkan hasil penelitian kualitas pelayanan perizinan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kuningan sebesar 82,66 %. Keduanya termasuk kedalam kriteria baik. Artinya komunikasi, sumber daya, disposisi, stuktur birokrasi yang meliputi Penyaluran komunikasi, Kejelasan informasi, kemudahan berkomunikasi, Konsistensi terhadap kebijakan, Kecukupan staf dan dukungan pelatihan agar berkompeten, Kemudahan informasi penggunaan, Pembagian wewenang penggunaan, Dukungan fasilitas yang memadai, pemilahan personil, dukungan Insentif, Standard operating procedures (SOP), dan Penyebaran Tanggungjawab terhadap pelaksanaan sistem informasi perizinan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kuningan baik.

Pengaruh Perencanaan dan Implementasi Sistem Informasi Perizinan Terhadap Kualitas Pelayanan Herregistrasi SIUP di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kuningan

Dari hasil pengujian sesuai perhitungan *SPSS for windows version 17* diperoleh R^2 sebesar 0,780 artinya bahwa perencanaan dan implementasi berpengaruh terhadap kualitas pelayanan perizinan sebesar 78,00% sedangkan sisanya sebesar 22,00% dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Perencanaan berkaitan dengan upaya menurunkan ketidakpastian di masa yang akan datang, ini sangat penting baik untuk suatu organisasi

maupun para karyawannya. Perencanaan merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Dalam suatu badan atau instansi, setelah melakukan proses perencanaan perlu dilakukan implementasi dari perencanaan yang telah ditetapkan yaitu berupa kebijakan, Implementasi kebijakan merupakan faktor penting bagi sebuah keberhasilan sebuah kebijakan, tanpa diimplementasikan kebijakan publik hanya akan menjadi dokumentasi belaka. Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan mencapai tujuannya. Perencanaan dan implementasi saling melengkapi tanpa perencanaan implementasi tidak akan berjalan dengan baik, begitupula sebaliknya.

KESIMPULAN

Perizinan Berbasis Aplikasi Web Terhadap Kualitas Pelayanan Herregistrasi SIUP Di BPPT Kabupaten Kuningan“, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh perencanaan terhadap kualitas pelayanan herregistrasi SIUP sebesar 35,8 % di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kuningan.
2. Terdapat pengaruh implementasi sistem informasi perizinan terhadap kualitas pelayanan herregistrasi SIUP sebesar 26,3 % di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kuningan.
3. Terdapat pengaruh secara bersama-sama sebesar 78,00 % dari perencanaan dan implementasi sistem informasi perizinan berbasis aplikasi web terhadap kualitas pelayanan herregistrasi siup di badan pelayanan perizinan terpadu kabupaten kuningan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Suatu sistem informasi dapat dikembangkan karena adanya suatu

perencanaan terlebih dahulu. Tanpa adanya perencanaan sistem yang baik pengembangan sistem tidak akan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka dari itu perlu dirumuskan perencanaan terlebih dahulu agar dapat menuntun pembuat untuk menghasilkan suatu sistem yang standar.

2. Perlu adanya pendidikan dan pelatihan yang kontinyu kepada para pegawai agar dapat meningkatkan kemampuan dalam menggunakan system informasi secara efektif dan efisien sehingga tujuan pemanfaatan system informasi tersebut tercapai.
3. Perlu adanya sosialisasi pemahaman mengenai penggunaan system informasi perizinan ini sebagai sarana yang sangat penting dan membantu dalam memberikan proses layanan perizinan, sehingga pengguna tidak merasa terpaksa atau terbebani dengan adanya system informasi perizinan yang masih relative baru ini. Hal ini penting karena sistem informasi perizinan dapat meningkatkan kualitas pelayanan perizinan di BPPT kabupaten kuningan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
4. Dalam upaya optimalisasi pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan Pelayanan Perizinan Keliling dengan menggunakan kendaraan untuk mensosialisasikan sistem informasi perizinan sekaligus pelayanan langsung.
5. Perlu adanya evaluasi secara terus menerus mengenai penggunaan sistemn informasi perizinan ini, sehingga pengaruh penggunaan system akan tetap positif terhadap dampak individu yang pada akhirnya akan berpengaruh juga terhadap peningkatan kinerja organisasi.
6. Dalam proses pelayanan her-registrasi SIUP baik secara offline atau online diharapkan petugas perizinan melakukan survey ulang lokasi agar tidak terjadi adanya SIUP fiktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2002. *Kebijakan Publik Edisi Revisi*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah Akadun . 2009. *Teknologi Informasi Administrasi*. Alfabeta : Bandung.
- Agustino Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta, cv : Bandung.
- Budisatrio, Tjahjanto 2002, Divestasi atau Revitalisasi Badan Usaha Milik Daerah, Manajemen Usahawan Indonesia, No. 2 (31).
- Dunn, William N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Effendy, Onong Uchjana. 2002. Hubungan Masyarakat Suatu Studi Komunikologis. Bandung : Remaja Rosdakarya. Indrajit, Richardus, Eko. 2006. *Electronic Government :Strategi Pembangunan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta:Andi
- Grindle , Merilee .S (ed.).1980.*Politics and Policy Implementation in the third world*. New Jersey: PrincetonUniversity Press.
- H.A.S.Moenir.2000. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Bumi aksara : Jakarta. Hoogerwerf. 1983. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Erlangga
- Kotler Philip. (2002). *Manajemen Pemasaran*. Edisi MileniumJilid1&2. Prentallindo,Jakarta.
- Manullang, M. 2005. *Dasar-Dasar Manajemen*. Gajah Mada Univ. Press : Yogyakarta.
- Muhidin, S. A.2009. *Analisis Korelasi, Regresi, dan Jalur dalam Penelitian*. Pustaka Setia,cv.Bandung.
- Murhanda. Dan Yo Ceng, G. 2011. *Pengantar Teknologi Informasi*. Mitra Wacana Media:Jakarta.
- Priyatno, duwi.2012.*Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20*. Andi. Yogyakarta. Sedarmayanti. 2001. *Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi untuk menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan*. Mandar Maju : Bandung.
- Sinambela, dkk. 2008. *Reformasi Pelayanan Publik*. Bumi Aksara, pt : Jakarta.
- Soekartawi. 2000. *Manajemen Perencanaan Pembangunan*. Rajagrafindo,pt : Jakarta. Sondang P. Siagian. (1996). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara. Jakarta
- Sugiyono. 2007. *Statistika untuk Penelitian*. Alfabeta, cv : Bandung
- Sugiyono.2007. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Sunarto Edi. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta : Bandung.
- Sutedjo Budi. 2006. *Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Tjiptono. (2007). *Pemasaran Jasa*. Malang : Bayu Media.
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Widodo, Joko.2001. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses, Kebijakan Publik*. Malang. Bayumedia Publishing.
- Winarno, Budi.2007. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Media Pressindo : Jakarta.
- Yamit, Zulian . 2005. *Manajemen Kualitas Produk dan Jasa*. Ed. 1, Cet. 4.Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta.
- Sumber Lain :**
- Agus, R. (2011). Pengaruh Implementasi Kebijakan E-Government Tentang Penggunaan Sistem Informasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Terhadap Kualitas Pelayanan Aparatur BAPPEDA Kota Bandung. Universitas Komputer Indonesia. Bandung : tidak diterbitkan.
- Desy, H. (2011). Pengaruh Perencanaan Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan Pada Pemerintah Kota Padang. Universitas Padang Indonesia. Padang : tidak diterbitkan.
- Dewi, K. (2013). Pengaruh implementasi kebijakan E-Government terhadap kualitas kinerja aparatur Kota Cimahi. Universitas Komputer Indonesia. Bandung : tidak diterbitkan.
- Sopyan, P. (2011). Pengaruh Pemberian Motivasi dan Kompetensi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik di BPPT Kab. Kuningan. Program Pasca Sarjana Uuswagati Cirebon : Tidak diterbitkan.
- GR Terry. <http://stiacomunitypalu.blogspot.com/2012/11/beberapa-arti-perencanaan-menurut-para.html>, 11 februari 2013
- Harold, K dan Cyril, O Arti Perencanaan Menurut Para Ahli : H0404055's Blog.htm.16 Februari 2013

Soekartawi, Arti Perencanaan Menurut Para Ahli : H0404055's Blog.htm. Diakses 16 Februari 2013

James A.F Stoner, Arti Perencanaan Menurut Para Ahli : H0404055's Blog.htm. 16 Februari 2013

Stephen Robin dan Mary Coulter .Perencanaan. Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.htm. <http://id.wikipedia.org/wiki/Perencanaan>, 15 Februari 2013

Edvin, R.Perencanaan Proyek Sistem Informasi. <http://edvinramadhan.blogspot.com/2010/08/perencanaan-proyek-sistem-informasi.html>, 07 Mei 2013

<http://venotes.wordpress.com/2010/11/25/teori-implementasi-edward-iii/>

